



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jalan El Tari Telp./ Fax. (0382) 21105  
**MAUMERE**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SIKKA**

**NOMOR : DPMD.050/ 16 /VII/ 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA NOMOR DPMD.050/24/XI/2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA  
UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIKKA  
TAHUN 2018-2023**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SIKKA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 - 2023, perlu melakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Sikka Nomor 41 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019 - 2023, Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12);
12. Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Sikka Nomor 41 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 41);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (nama Perangkat Daerah) Tahun 2018 – 2023.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka.

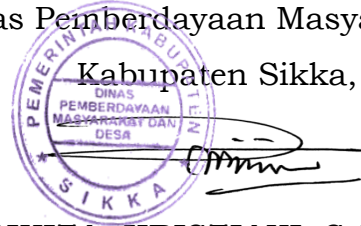
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere

pada tanggal 1 Juli 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sikka,



**FITRINITA KRISTIANI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP 19731028 199302 2 003

LAMPIRAN :  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
NOMOR : DPMD.050/16 /VII/ 2021  
TANGGAL 1 JULI 2021  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
TAHUN 2019-2023

**A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

- Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Visi : Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023
- Misi : 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas  
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
- Tujuan : 1. Berkurangnya Desa Tertinggal  
2. Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik  
3. Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran
- Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Fungsi : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;  
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;  
3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;  
4. Pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;  
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1	2	3	4	6	5	7	8
1.	Meningkatnya Pemenuhan Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomu dan Ketahanan Lingkungan	Indeks Desa Membangun	Formulasi Indeks Desa Membangun :  $IDM = \frac{1}{3} (IKS + IKE + IKL)$			DPMD	DAU
		Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	$Y = \frac{Total\ Skor\ x}{Nilai\ Maksimum\ (x)}$			DPMD	DAU
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	$Y = \frac{Total\ Skor\ x}{Nilai\ Maksimum\ (x)}$			DPMD	DAU
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	$Y = \frac{Total\ Skor\ x}{Nilai\ Maksimum\ (x)}$			DPMD	DAU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1	2	3	4	6	5	7	8
2.	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	Persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir	$\frac{\text{Jumlah usulan masyarakat desa yang terakomodir dalam APB desa}}{\text{Jumlah usulan masyarakat dalam RKP desa}} \times 100\%$			DPMD	DAU
					<b>A. Program Bidang :</b>		
				<b>Capaian Penataan Desa</b>	<b>I. Program Penataan Desa</b>		
				Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Penataan Desa	1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Bidang Pemdes dan Bidang PPMD	DAU
				Jumlah Desa persiapan terfasilitasi menjadi Desa definitif	1) Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa		
				Jumlah Desa terfasilitasi Penataan kawasan Perdesaan dan Perencanaan Pembangunan Desa	2) Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa		
				Jumlah Desa terfasilitasi Penataan Kewenangan Desa	3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa		
				Jumlah Desa terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	4) Sub Kegiatan Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa		
				Jumlah Perangkat Desa (Aparat Desa dan BPD) dibayarkan Dana Operasional, Penghasilan Tetap	5) Sub Kegiatan Penyediaan dana Operasional, Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya bagi		

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DANA</b>
1	2	3	4	6	5	7	8
				dan Tunjangan lainnya	Perangkat Pemerintahan Desa		
				<b>Capaian Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>II. Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>		
				<b>Jumlah Desa terfasilitasi Kerjasama antar Desa</b>	<b>1. Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Desa</b>	<b>Bidang Adm.Pemdes, Bidang Pemdes dan Bidang PPMD</b>	<b>DAU</b>
				Jumlah Desa Kerjasama Antar Desa	1) Sub Kegiatan Kerjasama Antar Desa		
				<b>Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan</b>	<b>III. Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Bidang Bidang Pemdes</b>	<b>DAU</b>
				<b>Persentase capaian pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		
				Jumlah Aparatur yang mengikuti Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1) Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
				Jumlah Produk Hukum Desa yang terfasilitasi dalam penyusunannya	2) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa		



<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DANA</b>
1	2	3	4	6	5	7	8
				Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	3) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		
				Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		
				Jumlah Aparatur Desa dan BPD yang mengikuti Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dan BPD	5) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan BPD		
				Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	6) Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa		
				Jumlah Desa yang dokumen Peraturan Desa dievaluasi dan diawasi	7) Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		
				Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	8) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa		
				Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	9) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		
				Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	10) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa dan		

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DANA</b>
1	2	3	4	6	5	7	8
					Evaluasi Perkembangan Desa		
				Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	11) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		
				<b>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Kelembagaan Adat dan Lembaga Hukum Adat yang dilaksanakan</b>	<b>IV. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Hukum Adat</b>	<b>Bidang Bidang Pmdes dan Bidang PPMD</b>	<b>DAU</b>
				<b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Hukum Adat yang diberdayakan</b>	<b>1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Kabupaten / Kota</b>		
				Capaian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (BBGRM,PKK,Posyandu dan BP-SPAM)	1) Sub Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat		
				Capaian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (,Posyandu dan BP-SPAM)	2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan		
				Jumlah Peserta yang mengikuti Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat ( Pelatihan	3) Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1	2	3	4	6	5	7	8
				Manajemen BUMDes dan Pelatihan TTG di Bidang Pengelolaan Hasil Pasca Panen)			
				Jumlah Peserta yang terfasilitasi mengikuti Gelar TTG Tingkat Nasional	4) Sub Kegiatan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
3.	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik	Meningkatnya profesionalitas ASN	$(25 \times (1 - \text{jml gaps})) + (25 \times (1 - \text{jml selisih kompensasi terendah})) + ((25 \times \text{jumlah rata-rata kinerja SKP}) / 100) + (25 \times (1 - \text{jml pelanggaran disiplin}))$		Indeks profesionalisme ASN		
			$\frac{\text{Jumlah skor penilaian indicator aspek sarana prasarana}}{\text{Jumlah aspek sarana prasarana}}$		Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik		
					<b>B. PROGRAM NON BIDANG</b>		
				<b>Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1. <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Sekretaris	DAU
				<b>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi</b>	1. <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
				Jumlah dokumen ( Renstra dan Renja ) perencanaan yang disusun	1) Sub. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
				Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DANA</b>
1	2	3	4	6	5	7	8
				Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				<b>Jumlah pelaksanaan Administrasi Keuangan</b>	<b>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Sekretaris	DAU
				Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
				Jumlah Pengelola Keuangan yang dibayarkan honorinya	2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		
				Jumlah dokumen laporan keuangan dan aset yang disusun	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		
				<b>Jumlah pelaksanaan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>DAU</b>
				Jumlah mesin absensi yang diadakan	1) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
				Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		
				<b>Jumlah pelaksanaan administrasi umum</b>	<b>4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>DAU</b>
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi		

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DANA</b>
1	2	3	4	6	5	7	8
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
				Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
				Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
				Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
				Jumlah surat kabar/majalah	6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
				Jumlah rapat koordinasi, konsultasi evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di dalam dan keluar daerah	7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks profesionalisme ASN	$(25 \times (1 - \text{jml gaps})) + (25 \times (1 - \text{jml selisih kompensasi terendah})) + ((25 \times \text{jumlah rata-rata kinerja SKP}) / 100) + (25 \times (1 - \text{jml pelanggaran disiplin}))$				
		Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik	$\frac{\text{Jumlah skor penilaian indikator aspek sarana prasarana}}{\text{Jumlah aspek sarana prasarana}}$				

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DANA</b>
1	2	3	4	6	5	7	8
					5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretaris	DAU
				Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang diadakan	1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas tamu Operasional atau Lapangan		
				Jumlah Meja kerja, kursi rapat, lemari, rak yang diadakan	2) Pengadaan Mebel		
				Jumlah mesin potong rumput yang diadakan	3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
				Jumlah alat studio yang diadakan			
				Jumlah alat komunikasi yang diadakan			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	4) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		
				Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretaris	DAU

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DANA</b>
1	2	3	4	6	5	7	8
				Jumlah surat yang terkirim melalui pos kilat dan ekspedisi lainnya dalam 1 tahun	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
				Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan honorinya			
				Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air, listrik dan internet	2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		
				Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan honorinya selama 12 bulan	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
				<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>DAU</b>
				Jumlah pengemudi mobil dinas yang dibayarkan honorinya selama 12 bulan	1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya			
				Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			
				Jumlah meja, lemari yang diperbaiki	3) Pemeliharaan Mebel		
				Jumlah komputer/laptop, printer kantor yang diperbaiki	4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1	2	3	4	6	5	7	8
				Jumlah mesin potong rumput yang dipelihara			
				Jumlah Alat Studio dan Komunikasi yang dipelihara			
				Jumlah bagian gedung kantor yang dipelihara	5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diservice (AC)	6) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sikka,



**FITRINITA KRISTIANI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP 19731028 199302 2 003



**B. TARGET TAHUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya pemenuhan akses ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan	Indeks Desa Membangun	0,560	0,565	0,606	0,636	0,655	0,695	0,695
		Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,617	0,650	0,664	0,694	0,724	0,754	0,754
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,432	0,434	0,507	0,547	0,587	0,627	0,627
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,630	0,611	0,649	0,669	0,689	0,709	0,709
2.	Persentase Usulan Masyarakat Desa yang diakomodir	<i>Jumlah usulan masyarakat desa yang terakomodir dalam APB desa</i> <i>Jumlah usulan masyarakat dalam RKP desa</i> x100%	78,18	80,13	82,13	84,13	86,28	88,34	88,34
3.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Kualitas Pelayanan Publik Dinas	1,740	1,840	1,940	2,040	2,140	2,240	2,240
		Indeks Profesionalitas ASN	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	70,00	70,00

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik	Indeks Sarana dan Prasarana	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,00

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Sikka,



**FITRINITA KRISTIANI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP 19731028 199302 2 003